

# PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI IKIP YOGYAKARTA

( Oleh : Sumantri W. )

## 1. PENDAHULUAN

Sesudah Perang Dunia ke II, tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat menarik perhatian banyak kalangan, terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Umumnya negara tersebut telah merumuskan langkah kebijaksanaan untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat itu. Di Indonesia, dalam Repelita II secara eksplisit telah dicantumkan program pengurangan laju pertumbuhan penduduk dengan program *Keluarga Berencana, penurunan kematian bayi dan Pendidikan Kependudukan.*

Timbulnya gagasan untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan kependudukan harus dilihat dari segi perkembangan yang terjadi sejak Perang Dunia II. Perubahan yang terpenting adalah perubahan politik sejak kemerdekaan, usaha pemerintah banyak diarahkan guna menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan penduduk. Hasil yang sangat menonjol adalah dibidang kesehatan. Sarana program ini telah diterima dengan gembira sampai dipelosok desa.

Konsekuensinya adalah penurunan secara dramatis pada tingkat kematian bayi maupun orang dewasa. Yang dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek dari periode sebelumnya (Robert C. Cook 1968 hal 35).

Pada waktu yang sama tingkat kelahiran masih tetap tinggi, bahkan adanya perbaikan kesehatan ibu, lebih banyak kandungan yang dapat mencapai waktu kelahiran, dan lahir dalam keadaan selamat ibu dan anak.

Akibatnya terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat (eksplosi penduduk). Pertumbuhan demikian akan berlangsung terus di masa mendatang, disebabkan oleh harapan hidup saat lahir semakin meningkat. Dengan demikian susunan penduduk akan menjadi muda, berdasarkan sensus 1971 penduduk berusia di bawah 15 tahun sebanyak 44,1 % ( BPS th 1975 hal 1. )

Apabila kelompok ini dapat mencapai usia reproduksi maka tidak mustahil tingkat kelahiran akan tetap tinggi, sementara tingkat kematian sudah sedemikian rendah. Anak-anak yang lahir sekitar tahun 1960, pada Pelita II dan III sudah memasuki usia reproduksi, dilihat peranannya terhadap pertumbuhan penduduk, dan sudah memasuki angkatan kerja dilihat dari umur kerja dan sudah memasuki jenjang Perguruan Tinggi dilihat dari jenjang pendidikan.

Kenyataan ini menghadapkan negara kita pada persoalan yang pelik. Dependency Ratio akan naik terus, sehingga pekerja produktif harus bekerja keras guna mempertahankan tingkat pendapatan (N. Iskandar 1974 hal. 15). Modal yang seharusnya dapat dipergunakan untuk investasi di bidang produksi, harus dipergunakan untuk mendirikan sekolah, jasa kesehatan dan pemenuhan konsumtif sehari-hari. Pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi pula di pedesaan, akibatnya akan dirasakan pula oleh penduduk pedesaan itu yang hidup dari pertanian. Keadaan demikian akan mengakibatkan luas tanah pertanian untuk setiap orang terus menurun, pengangguran yang semakin meningkat, kecenderungan yang ada ialah meningkatnya arus urbanisasi, hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru di kota besar.

Apabila diperhatikan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat sesudah Perang Dunia ke II, termasuk di Indonesia disebabkan menurunnya tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang tetap tinggi. Penghambatan pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan peningkatan migrasi keluar, peningkatan kematian atau penurunan kelahiran. Cara pertama (migrasi keluar) tidak akan dapat menolong, sebab negara lain umumnya sangat membatasi pendatang baru. Cara kedua, yaitu peningkatan kematian, tidak ada pemerintah yang berani mengambil langkah demikian .

Tinggal satu pilihan, ialah usaha untuk menurunkan tingkat kelahiran. Rupanya langkah ini mendapat tanggapan yang menggembirakan, lebih awal dapat dilaksanakan, lebih cepat terasa hasilnya. Langkah yang dapat ditempuh melalui program Keluarga Berencana, program ini secara langsung akan dapat terasa hasilnya, terutama bagi pasangan suami istri dalam status subur.

Akan tetapi bagian dari penduduk ( Indonesia ) 44,1 % berusia di bawah 15 tahun, yang secara pasti akan segera masuk dalam kelompok reproduktif, pasti belum akan terjangkau dengan program KB. tetapi kelompok ini harus dapat dipersiapkan untuk menghadapi masa depannya, pasti tidak tepat apabila dengan program KB. tetapi dapat dengan program lain.

Sejak tahun 1970 telah diketengahkan suatu program yang akan menjangkau bagian penduduk yang belum termasuk kelompok pasangan suami istri, tetapi masih dalam status single, yang biasanya masih dalam status pelajar / mahasiswa.

Kelompok ini seharusnya mendapat pendidikan yang dapat menumbuhkan perhatian terhadap masalah kependudukan. Ini dapat dicapai melalui program Pendidikan Kependudukan, yang diberikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Program ini benar-benar merupakan pendidikan bukan program aksi seperti KB tetapi merupakan program jangka panjang, dalam hal pencapaian hasil.

## 2. PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Kesungguhan Pemerintah ORDE BARU dalam menangani masalah kependudukan tercermin dalam keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam menandatangani deklarasi Kependudukan dalam tahun 1967 bersama-sama 30 negara anggota PBB yang lain. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan para pemimpin pemerintah itu antara lain :

- a. bahwa persoalan penduduk harus diakui sebagai unsur pokok dalam program nasional jangka panjang apabila pemerintah terlibat mencapai tujuan ekonomi dan memenuhi harapan bangsa.
- b. bahwa kebanyakan orang tua berhasrat mengetahui cara untuk menentukan besarnya keluarga, keputusan menentukan besarnya keluarga merupakan hak asasi mereka sebagai manusia.
- c. bahwa perdamaian abadi dan berarti akan tergantung sebagian besar pada cara tantangan pertumbuhan penduduk dihadapi.
- d. bahwa tujuan keluarga berencana memperkaya kehidupan manusia, dan bukan mengurangi, menjamin kesempatan lebih luas bagi setiap orang, keluarga berencana membebaskan manusia untuk meraih martabat perorangan yang

luhur dan mengembangkan kesanggupannya dalam arti se-luas-luasnya ( Dr. N Iskandar dan Dr. Does Sampoerno tahun 1973 hal 110 ).

Dengan pertimbangan ini dan keyakinan bahwa tingkat - pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan salah satu tantang-an penting untuk mencapai tujuan pembangunan, maka perlu di-rumuskan suatu kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh.

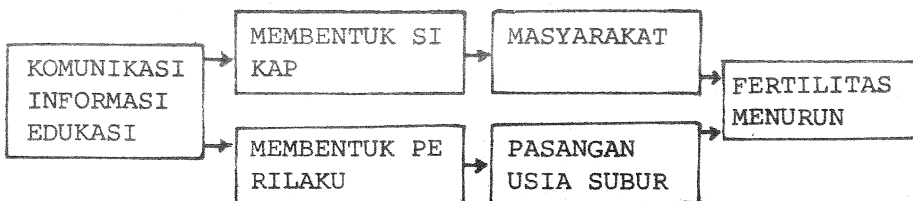
Keberhasilan dalam memperlambat laju pertumbuhan pen-duduk akan memberi kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup warga negaranya. Penurunan tingkat kelahiran bukanlah suatu yang berlangsung secara otomatis, tetapi memerlukan waktu. Dalam usaha mempertinggi jumlah akseptor dapat ditempuh me-lalui dua kegiatan ( Soemantri th 1980 hal 5 ) sebagai beri-kut :

- a. Kegiatan yang langsung untuk memberi pelayanan bagi ma-syarakat yang memerlukan.
- b. Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan KB.

Harapan dari kegiatan tersebut adalah berhasilnya pe-nurunan fertilitas dengan segera.

Kegiatan yang langsung untuk memberi layanan, diberikan ke-pada mereka yang dalam status kawin, masih dalam periode re-produktif. Sedang kegiatan penunjang dapat dilaksanakan de-ngan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) bagi semua anggota masyarakat, baik kelompok PUS, maupun lainnya, de-ngan harapan agar mengambil sikap dan langkah yang rasional dalam menghadapi gejala kependudukan yang kurang menguntung-kan.

Kalau digambarkan dengan wujud skema adalah sebagai berikut:



Dengan skema tersebut nampak bahwa penurunan fertili-tas secara langsung dapat diharapkan dari jalur perilaku oleh PUS. sebagai peserta KB. Sedang pembentukan sikap dapat diharap-

kan dari semua anggota masyarakat, baik yang belum masuk kelompok reproduktif, reproduktif maupun yang sudah melampaui masa reproduktifnya. Hasilnya pasti tidak dapat dilihat dengan segera. Untuk lebih menyebar luaskan informasi mengenai kependudukan maka *Pendidikan Kependudukan* diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan, mencakup lembaga pendidikan guru, pendidikan tingkat sekolah dasar, menengah Pertama / atas sampai Perguruan Tinggi.

Oleh karena tidak semua anggota masyarakat sedang berada pada tingkat pendidikan tersebut, merekapun perlu mendapat informasi kependudukan, ini dapat ditempuh melalui pendidikan orang dewasa / luar sekolah. Para lulusan SMP/SMA dan orang dewasa amat memerlukan informasi mengenai kependudukan. Sebab mereka ini yang dalam waktu relatif singkat akan membentuk keluarga.

### 3. PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI IKIP YOGYAKARTA

#### a. Landasan.

Sejak tahun 1970 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah diperkenalkan komponen baru dalam pendidikan di Indonesia, yaitu Pendidikan Kependudukan. Dari tahun 1970 sampai tahun 1975 merupakan tahap persiapan untuk melaksanakan program Pendidikan Kependudukan ke dalam program pengajaran. Berbagai kegiatan seperti Seminar Lokakarya telah dilaksanakan untuk memantapkan dan kesepakatan pandangan terhadap program baru tersebut. Hasilnya adalah dicantumkannya secara eksplisit.

Pendidikan Kependudukan dalam kurikulum Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Walaupun dalam pelaksanaannya menempuh pendekatan yang berbeda, dari SD sampai SLA ditempuh melalui pendekatan integratif, sedang untuk Perguruan Tinggi dengan pendekatan monolitik, sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dengan beban kredit 2 sks.

IKIP sebagai lembaga yang mempersiapkan tenaga guru dan kependidikan, maka lembaga Pendidikan Kependudukan untuk tingkat sekolah lewat IKIP mempunyai jangkauan yang luas. Mahasiswa IKIP dipersiapkan untuk menjadi guru di tingkat SPG. yang pada gilirannya akan menjadi guru di Sekolah Dasar maupun guru SLP/SLA. Disamping itu mahasiswa telah men-

dekati/siap memasuki jenjang berumah tangga.

Itulah sebabnya Pendidikan Kependudukan bagi mahasiswa IKIP mempunyai *kepentingan ganda*, satu pihak sebagai bekal dalam menjalankan tugas di kemudian hari sebagai guru, maupun bekal bagi diri *pribadi* sebagai anggota masyarakat yang akan berumah tangga. Mereka diharapkan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai guru, dan mampu bersikap dan bertingkah laku rasional terhadap masalah kependudukan.

Disebutkan bahwa tugas dan peranan guru dalam rangka Pendidikan Kependudukan dapat dibedakan

- ( PNPK 1976 hal 6 )
- a. guru sebagai guru
  - b. guru sebagai pimpinan masyarakat
  - c. guru sebagai orang tua

Berdasarkan tugas dan peranan itulah maka mahasiswa IKIP sepatutnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang fenomena kependudukan yang sedang terjadi didalam negeri maupun di negara lain. Surat Keputusan Menteri P dan K No.: 0193/U/1976 yang menyebutkan ( LP2K IKIP YOGYAKARTA 1979 hal 2) sebagai berikut :

1. Pendidikan Kependudukan dimasukkan dalam kurikulum IKIP Fkg dan FIP sebagai suatu mata kuliah umum.
2. Pendidikan Kependudukan diberikan pada semester ke III paling sedikit 2 Sks.
3. Pelaksanaan Program Pendidikan Kependudukan sudah dapat dimulai sejak 1 Januari 1977.

Untuk memenuhi maksud dari SK No 0193/U/1976 itu di lingkungan IKIP Yogyakarta didirikan Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan ( LP2K ) IKIP Yogyakarta yang ditugasi untuk menyelenggarakan perkuliahan Pendidikan Kependudukan.

#### b. Tujuan.

Program Pendidikan Kependudukan pada IKIP Yogyakarta mempunyai tujuan :

1. Membentuk sikap dan tingkah laku kependudukan yang tepat di kalangan para mahasiswa IKIP Yogyakarta. Para mahasiswa sebagai golongan terpelajar di dalam masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan dalam hal gagasan, sikap, tingkah laku kependudukan yang tepat.

2. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada para mahasiswa IKIP Yogyakarta agar sebagai guru/pendidik di kemudian hari mereka dapat menyampaikan pengetahuan; gagasan dan keyakinan kependudukannya kepada anak didik melalui bidang studi yang mereka ajarkan.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut kepada para mahasiswa - disajikan

1. Fakta-fakta, pengetahuan, gagasan dan kebijaksanaan kependudukan, untuk mencapai tujuan pertama.
2. Pendekatan, metode penilaian pendidikan kependudukan disekolah maupun di luar sekolah, untuk mencapai tujuan kedua.

### c. Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan seperti dirumuskan di atas dan untuk memberi bekal pengetahuan yang cukup kepada para mahasiswa mengenai fenomena kependudukan, dalam program perkuliahan Pendidikan Kependudukan dilaksanakan :

1. Mata kuliah Pendidikan Kependudukan merupakan Mata Kuliah Dasar Umum ( MKDU ) wajib tempuh, beban kredit 2 sks.
2. Materi yang diberikan meliputi materi yang telah digariskan oleh PNPk meliputi 13 bidang dan tiap bidang - terdiri dari unit-unit, tiap unit terdiri dari topic-topic, yaitu ( PNPk th 1976 hal 11 ) :  
 Pengantar pada Pendidikan Kependudukan  
 Konsep-konsep dasar Kependudukan  
 Pertumbuhan penduduk dan kehidupan sosial  
 Pertumbuhan penduduk dan ekonomi  
 Pertumbuhan penduduk dan pendidikan  
 Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi  
 Pertumbuhan penduduk dan transmigrasi  
 Pertumbuhan penduduk dan keselarasan  
 Pertumbuhan penduduk dan kesehatan  
 Pertumbuhan penduduk dan kehidupan keluarga  
 Pertumbuhan penduduk dan kebijaksanaan kependudukan  
 Syllabus Pendidikan Kependudukan untuk SLTP, SLTA dan PLS Peranan guru dalam Pendidikan Kependudukan.
3. Untuk memberikan demikian banyak topic yang harus diketahui oleh mahasiswa dan sesuai dengan mata kuliah ini

yang inter disiplin, maka dalam pelaksanaannya ditempuh dengan sistem team, yaitu tiap-tiap topic diberikan oleh tenaga dosen yang mempunyai latar belakang cukup untuk itu.

Karena itu team ini terdiri dari dosen-dosen tetap di lingkungan IKIP Yogyakarta dari beberapa Fakultas (FIP FKIS, FKIE).

4. Jadwal kuliah sebagai mata kuliah umum dilaksanakan pada sore hari, diikuti oleh mahasiswa dari jurusan tertentu (dapat lebih dari dua jurusan) agar mencapai jumlah + 100 mahasiswa tiap sekali pertemuan (1 hari 2 kali pertemuan masing-masing 1 1/2 jam dari kelompok yang berbeda). Pada semester III yang baru lalu mahasiswa peserta kuliah Pendidikan Kependudukan di IKIP Yogyakarta sebanyak + 1.000 mahasiswa. Untuk memudahkan pengawasan dalam pelaksanaan tiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan mendapat kartu presensi yang akan menunjukkan kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah.
5. Ujian dan penilaian.  
Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah paling sedikit 75% dari jumlah kuliah yang seharusnya diikuti selama satu semester diperkenankan untuk mengikuti ujian tengah semester, dan ulangan bagi mereka yang belum berhasil. Administrasi perkuliahan / presensi dan nilai dilakukan oleh lembaga, kemudian dikirim ke Sub bagian Pengajaran Fakultas dan Bagian Registrasi.
6. Penyelenggaraan perkuliahan selama satu semester diatur agar tidak ada jam kosong, apabila ada anggota team yang seharusnya memberi kuliah berhalangan, diganti oleh dosen lain anggota team untuk topic lain, (bagian dosen pengganti) sehingga tidak ada *kuliah kosong* untuk ini.
7. Dosen menyampaikan topic harus menyiapkan naskah, yang diperbanyak oleh Lembaga sehingga dapat dibagikan kepada Mahasiswa, pada akhir kuliah, kecuali mahasiswa mendapat kuliah lesan, juga memiliki bahan tertulis lengkap 13 topic yang dibahas.



d. Beberapa keuntungan.

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan sebagaimana ditempuh oleh LP2K IKIP Yogyakarta, dapat dicatat beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. Mahasiswa memperoleh sejumlah bahan yang disajikan baik lesan maupun tertulis.
2. Oleh karena administrasi perkuliahan ini diusahakan se baik-baiknya, maka mahasiswa dapat mengetahui dengan segera boleh atau tidaknya mengikuti kuliah / ujian ( ikut kuliah dan ujian harus menunjukkan kartu presensi masing-masing ). Kartu kuliah ini diambil sebelum kuliah berlangsung, dan dikembalikan sesudah kuliah berakhir kepada petugas.
3. Oleh karena penyelenggara kuliah diusahakan tidak ada kosong maka semua bahan yang direncanakan dapat diselesaikan sampai semester berakhir.

e. Beberapa kekurangan.

Walaupun sudah dipersiapkan dengan rencana yang baik, tetapi masih terdapat kekurangan antara lain :

1. Oleh karena kuliah berlangsung (harus berlangsung) sedang halangan bagi dosen itu sering terjadi (karena tugas lain) sistem penggantian dengan topic lain kadangkadangkang melompat jauh dari urutan yang sudah dipersiapkan, yang ada kaitannya dengan urutan pemberian tugas.
2. Oleh karena berupa team, maka tidak mustahil terjadi bahan dibicarakan ulang / tidak terbicarakan.
3. Oleh karena topic yang harus diberikan sebanyak 13, sedang kuliah selama 1 semester hanya sebanyak 16 minggu termasuk ujian tengah semester, maka tiap topic hanya diberikan sekali pertemuan 1 1/2 jam kuliah, dengan demikian akan terjadi bahan tidak dapat dibicarakan secara tuntas.

f. Usaha penanggulangan.

Usaha-usaha untuk memperbaiki dalam pelaksanaan Kuliah Pendidikan Kependudukan ditempuh langkah :

1. Kecuali kuliah lisan tiap topic harus dibuat naskah tertulisnya.
2. Untuk menyesuaikan bahasan bagian masing-masing anggota team diadakan pertemuan-pertemuan / rapat untuk kesempatan, diskusi dan konsultasi bahan.
3. Untuk menyesuaikan program dengan perkembangan diluar, dalam bidang Kependudukan LP2K memberi kesempatan kepada anggota team sebagai perorangan ataupun mewakili lembaga mengikuti kegiatan seperti RAKERDA BKKBN Propinsi, Seminar dan Loka Karya Kependudukan di Pusat Penelitian dan, Studi Kependudukan UGM, Penataran Pendidikan Kependudukan yang diselenggarakan oleh PNPK dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Kependudukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- B Ps. SENSUS PENDUDUK 1971 PENDUDUK INDONESIA Jakarta 1975.
- ISKANDAR N. BEBERAPA ASPEK PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta 1974.
- ISKANDAR N. DR. MASALAH PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA DOES SAMPOERNO DR Jakarta 1973.
- IP2K IKIP YOGYAKARTA KUMPULAN KULIAH PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN IKIP YOGYAKARTA Yogyakarta 1979.
- P N P K PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN KUMPULAN POKOK BAHASAN UNTUK MAHASISWA IKIP FIP FKG Jakarta 1976.
- PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN Jakarta 1976.
- ROBERT C COOK PEOPLE  
JANE LECHT Columbia Books, Publishers Washington DC 1968.
- SOEMANTRI PERANAN APSARI DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA IKIP YOGYAKARTA th. 1980.